



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A

JL.LaksamanaYosSudarso No.49 A Telp/Fax (0481) 21018

WATAMPONE 92715

Website : pa-watampone.net

E-mail:watampone@pta-makassarkota.go.id.

PENGUMUMAN

PENGADAAN LANGSUNG PENYEDIA JASA LAYANAN POS BANTUAN HUKUM PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : W20-A2/ 2485 /PL.08/XII/2021

Dalam rangka persiapan pelaksanaan anggaran DIPA Pengadilan Agama Watampone TA 2022 Nomor SP DIPA-005.04.2.309076/2022 tanggal 17 Nopember 2021, maka Pengadilan Agama Watampone membuka Pendaftaran Calon Penyedia Jasa Konsultansi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) TA 2022 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dan Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 dan Surat Kepala Biro Umum Mahkamah Agung selaku Kepala ULP Nomor 3/Bua.ULP/2/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Langkah-Langkah Pelaksanaan Pengadaan Penyedia Jasa Pos Layanan Bantuan Hukum Pengadilan, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. PAKET PEKERJAAN

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi Layanan Posbakum
Lokasi Pekerjaan : Pengadilan Agama Watampone
Alamat : JL. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A Watampone
Nilai HPS : Rp. 70.000.000,- (*Tujuh puluh juta rupiah*)
Sumber Dana : DIPA Nomor 005.04.2.309076/2022
Tanggal 17 Nopember 2021
Metode yang digunakan : **Metode Pengadaan Langsung**

B. PERSYARATAN

1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dari organisasi Profesi Advokat / LBH Perguruan Tinggi / Organisasi LBH dari Lembaga Swadaya Masyarakat;
2. Memiliki struktur kepengurusan yang jelas;
3. Memiliki kantor dan alamat yang jelas di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Watampone dan atau sekitarnya
4. Memiliki SK pengesahan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) oleh Kementerian Hukum dan Ham
5. Memiliki minimal 1 (satu) orang Advokat dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Perhimpunan / Ikatan Profesi yang ditugaskan sebagai Team Leader;
6. Memiliki minimal 1 (satu) orang staf atau anggota yang nantinya bertugas di POSBAKUM Pengadilan, yang bergelar minimal Sarjana Hukum atau Sarjana Syari'ah atau mahasiswa yang telah menempuh 140 SKS yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS);
7. Memiliki NPWP Lembaga / organisasi;
8. Memiliki rekening atas nama Lembaga/Organisasi/Pengurus LBH dibuktikan dengan lampiran surat keterangan dari Bank atau foto copy rekening koran;

9. Berpengalaman sebagai penyedia Jasa Layanan Posbakum di Pengadilan Agama minimal 2 (dua) tahun
10. Bersedia menyediakan alat pengolah data dan ATK untuk melaksanakan jasa Posbakum ini dibuktikan dengan surat pernyataan;
11. Surat pernyataan bersedia menandatangani Pakta Integritas.
12. Memiliki akun level penyedia pada Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Mahkamah Agung RI

C. TAHAPAN PENDAFTARAN

1. Bahwa Pejabat Pengadaan sebelum mengundang 1 (satu) penyedia untuk melaksanakan proses e-Pengadaan Langsung melalui LPSE MA, terlebih dahulu melakukan proses seleksi dokumen kualifikasi administrasi dan wawancara uji kompetensi terhadap beberapa penyedia yang memasukkan permohonan untuk mendapatkan dokumen kualifikasi administrasi yang berkualitas dan SDM yang berkompeten.
2. Setiap Peserta wajib membuat surat permohonan (tanpa dokumen penawaran) dan memasukkan dokumen kualifikasi administrasi sebagai calon penyedia jasa Posbakum Pengadilan Agama Watampone Tahun Anggaran 2022. Surat permohonan ditujukan kepada **“Pejabat Pengadaan Jasa Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Watampone”** dengan mencantumkan nomor telepon dan alamat email
3. Pendaftaran berupa surat permohonan dan pemasukan dokumen kualifikasi administrasi mulai tanggal **27 s.d 28 Desember 2021** dari jam **08.00 sd 16.30 WITA** (hari kerja dan jam kerja)
4. Dokumen dikirim ke alamat kantor Pengadilan Agama Watampone, JL. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A Watampone (Pengiriman dokumen melalui Pos/Jasa antar dokumen yang diterima melebihi batas waktu sesuai ketentuan poin 1, tidak akan diikutsertakan dalam verifikasi)
5. Dokumen kualifikasi administrasi terdiri dari :
 - Memiliki izin usaha
 - Memiliki bidang pekerjaan
 - Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan)
 - Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
 - Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - c. Kartu Tanda Penduduk
 - Pakta Integritas:
 - Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi :
 - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara

D. TAHAPAN JADWAL DAN SELEKSI

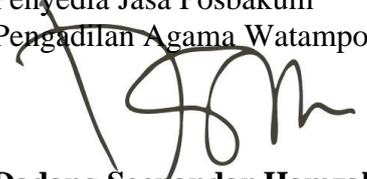
No	Tanggal	Kegiatan
1	27 sd 28 Desember 2021	Pemasukan dokumen kualifikasi administrasi
2	29 Desember 2021	Pengumuman hasil verifikasi dokumen kualifikasi administrasi
3	30 – 31 Desember 2021	Wawancara dan uji kompetensi petugas posbakum dan team leader
4	03 Januari 2021	Pengumuman pemenang 1-3(nilai hasil verifikasi dokumen kualifikasi administrasi + nilai wawancara dan uji kompetensi)
5	03 sd 11 Januari 2022	Pemenang 1 hasil verifikasi akan diundang untuk memasukkan proses penawaran melalui LPSE MA untuk mengikuti e-Pengadaan Langsung
		Selanjutnya dalam proses e-Pengadaan Langsung melalui LPSE MA akan melalui tahapan sbb : <ul style="list-style-type: none">- Pembukaan penawaran- Klarifikasi dan negosiasi harga- BAHPL (Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung)- Penunjukan sebagai penyedia Posbakum- Penandatanganan Perjanjian / MoU / Kontrak Kerja dan SPMK
		Apabila pemenang 1 tidak terjadi kesepakatan harga melalui proses klarifikasi dan negosiasi harga, maka dinyatakan gugur dalam proses pengadaan langsung melalui LPSE MA, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan undangan pengadaan langsung kepada pemenang 2, dst, sampai proses e-Pengadaan Langsung selesai pada tahapan Penandatanganan Perjanjian / MoU / Kontrak Kerja dan SPMK

Pengumuman hasil e-Pengadaan Langsung melalui LPSE MA Penyedia Jasa Konsultansi Layanan Posbakum dapat dilihat pada Website Pengadilan Agama Watampone atau pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone

Demikian informasi ini disampaikan untuk diketahui.

Watampone, 25 Desember 2021

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Penyedia Jasa Posbakum
Pengadilan Agama Watampone


Dadang Soenandar Hamzah, SE
Nip. 198812212015031001